BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai pedoman dan acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, untuk dapat Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu. Maka, terlebih dahulu Peneliti akan memberikan teori.

2.1.1 Administrasi dan Administrasi Publik

Secara Etimologi Administrasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau to *administear* yang berarti mengelola *(to mange)* atau menggerak *(to direct).* Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Sedangkan administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan"Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya"

Pada dasaranya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat di dalamnya. Menurut Irra dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) Administrasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu "Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasaldari kata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Administratie (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat,menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan dan Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakanproses kerjasama beberapa individu dengan cara yangefiesien dalam mencapai tujuan sebelumnya".

Dari pengertian diatas yang menjelaskan pengertian administrasi dalam arti sempit ataupun administrasi dalam arti luas agar lebih memperjelas pengertian administrasi.

Menurut Gie dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan bahwa "administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilkaukan sekolompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu".

Berdasarkan definisi diatas Peneliti menyimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan untuk mecapai tujuan.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah label yang diberikan untuk berbagai aktifitas yang dilakukan oleh manusia dimana aktifitas tersebut mengandung tujuan politik. Menurut Dye yang dikutip oleh Anggara dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2014:35) mengatakan bahwa "Kebijakan Publik adalah *"What government choose to do or not to do"*. Dalam pengertian tersebut, Dye mendefenisikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah unutk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Carl Friedrich dalam Leo (2012:12) menyebutkan kebijakan publik adalah "serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud."

Leo (2012:13) menyimpulkan ada 5 karakteristik utama dari defenisi kebijakan publik yaitu :

1. Perhatian kebijakan publik umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah/acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan/ yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif

Kebijakan publik di dasarkan pada hukum untuk memerintah. Sehingga besar kemungkinan sifatnya memaksa dan sah dilakukan dimana hal ini tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi swasta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mempermudah memahami kebijakan public, para ahli sepakat membaginya kedalam beberapa tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yang kutip oleh Budi Winarno (2007:32-34) yaitu:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditantang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut Abidin yang dikuti oleh Anggara dalam buku Analisis Kebijakan Publik (2014:37) mengemukakan bahwa “Kebijakan Publik tidak bersifat spesisfik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya”

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan pembuatan kebijakan publik. Kebijakan dibuat dan ditetapkan karena adanya suatu masalah yang di hadapi atau dibuat berdasarkan suatu kepentingan baik seseorang, kelompok atau pemerintahan itu sendiri.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) mengatakan "Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan".

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:148-154) mengatakan bahwa "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan".

Untuk memahami implementasi kebijakan maka dilakukan pendekatan.Menurut Sabatier (1984:277) sebagaimana di kutip oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012:48). Pendekatan dalam implementasi kebijakan dibagi 2 yaitu :*1) Top Down dan 2) Bottom Up*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.1 : Perbandingan Pendekatan *Top Down dan Bottom Up*

	Top Down	*Bottom Up*
Fokus Awal	Kebijakan pemerintah (Pusat)	Jaringan Implementasi pada level paling bawah
Identifikasi aktor utama yang terlibat dalam proses	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah sebagai konsekuensi implementasi	Dari bawah, yaitu para implementer pada level lokal ke atas
Kriteria evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan	Kurang begitu jelas, apa saja yang dianggap peneliti penting dan pny relevansi dengan kebijakan
Fokus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan	Interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dlm implementasi

2.1.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan monitoring dan pengumpulan informasi lain untuk menilai suatu program. Informasi-informasi tersebut juga digunakan untuk membuat perubahan dan peningkatan dalam pelaksanaan program.

Menurut Zain Badudu (2001:29), "Evaluasi adalah menilai atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasil lnya cukup baik atau buruk. Evaluasi Kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan". Menurut Anas (1996:1),"Evaluasi adalah suatu tindakan atau usaha proses untuk menentukan nilai dari sesuatu".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Ndraha (2003:202), Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut:

a. Model *Before – After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan,*treatment*). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*
b. Model *Das Solen – Das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak Ukurnya adalah das sollen.
c. Model kelompok kontrol – kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan).Tolak Ukurnya adalah kelompok control.

Agar tidak terjadinya penyimpangan data atau bahkan kesalahan data, evaluator harus memiliki langkah-langkah atau tahap apa yang akan dilakukan dalam melakukakan kegiatan evaluasi hal tersebut diperuntukkan sebagai pedoman atau landasan bagi evaluator sehingga hasil dari evaluasi tidak keluar dari konsep. Ndraha (2003:202), menyatakan ada beberapa langkah dalam melakukan evaluasi:

1. Pembuatan standar (kendali, S) beberapa standar: das sollen, data sebelumnya terhadap data-sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data-kontrol.
2. Pemantauan fakta (F)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil l perbandingan: F=S, F<S, F>S
5. a. ?----- > F=S ----- > ?
   b. ?----- > F<S ----- > ?
   c. ?----- > F>S ----- > ?
6. Analisis hasil l perbandingan berdasarkan model-model di atas,
7. Tindak lanjut:
   a. Tindakan korelatif
   b. Tindakan afirmatif
   c. *Feedback*

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*) dan pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi kinerja sangat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasil lkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Kemudian menurut Bryan & White (1987:21), "Evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana".

Menurut PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil l (outcome) terhadap rencana dan standar.

Menurut Suharto (2007:40), Evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya.
2. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai kelancaran perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan.
3. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

Jadi, evaluasi kebijakan itu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan, sehingga dapat memberikan panduan kepada para pelaksana kebijakan, dan menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan diwaktu mendatang.

Edward A. Suchman dalam Nugroho (2006:27), mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
b. Analisis terhadap masalah
c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab-penyebab lain
f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Suharto (2007:41-42), Evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bisa dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator masukan (*input indicators*): bahan-bahan dan sumber daya yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan
b. Indikator proses (*Process Indicators*): cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumber daya diolah atau ditransformasikan menjadi penyediaan pelayanan
c. Indikator keluaran (*Output Indikators*): Barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduki oleh suatu program
d. Indikator dampak (*Outcome Indocators*): hasil l atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program.

Menurut William N. Dunn (2003:17), Pengertian kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan politik. kebijakan publik merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik. Kebijakan Publik adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kebijakan publik mempunyai devinisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah kebijakan Publik bahwa “secara umum istilah kebijakan publik dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disamakan dengan penafsiran *(appraisasi),* pemberian angka (*rating),* dan penilaian *(assesment),* kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil l kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, kebijakan publik berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan".

Menurut William N. Dunn (2003:22), Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adobsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah

a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
b. Penetapan diperoleh dari alternatif merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
c. Penerapan saran keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai badan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan
d. Penilian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Danim (1997:17), Kebijakan publik penilaian *(evaluating)* adalah "proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut adalah:

a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
b. Bahwa penilian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilian adalah yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manjemen.
c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksana yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Menurut Koryati (2005:7), secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Lebih lanjut Koryati (2005:7), kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan dan aparaturnya sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
c. Kebijakan merupakan benar-benar apa yang dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau penyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
e. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undang dan bersifat memaksa *(otoritatip).*

Menurut Subarsono (2008:121), Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses sebagai berikut :

a. Input adalah bahan baku *(raw materials)* yangdigunkan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finensial, tuntutan-tuntutan, dan dukungan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakanm pelayanan/jasa, dan program.
c. Outcome adalah suatu hasil suatu hasil kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat suatu kebijakan.
d. Impacty (dampak) adalah akbiat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekwensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Sementara itu menurut Kansil dan Cristine (2003:190), Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha atau aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Menurut William (2003:608), Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata – kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah – masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Menurut Adisasmita (2011:115), Evaluasi kebijakan publik merupakan aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik akan melihat dan menilai kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah (daerah) apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum. Evaluasi kebijakan publik akan dapat menambah nilai dari proses kebijakan itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanpa adanya evaluasi kebijakan, kinerja kebijakan tidak dapat diterangkan dengan jelas dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Selanjutnya menurut Adisasmita (2011:609-610), Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan – tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Edward A. Suchman dalam Nugroho (2006:67), mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan :

1. Mengindentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab – penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menruut Nugroho (2003:183) Evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut:

a. Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan – tujuannya.
b. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut di implementasikan.
c. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

Jadi evaluasi kebijakan itu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan, sehingga dapat memberikan panduan kepada para pelaksana kebijakan, dan menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan diwaktu mendatang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.5 Konsep Tujuan Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh evaluator dengan agenda atau tujuan tertentu. Menurut Subarsono (2006:120), terdapat enam tujuan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi maka dapat diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan
4. Mengukur dampak (positif atau negatif) suatu kebijakan
5. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi
6. Sebagai masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan terjadi.

Pendapat senada menurut Luankali (2007:94), tentang tujuan atau fungsi evaluasi adalah:

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan (kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai via tindakan publik). Sebenarnya tujuan–tujuan tertentu (%) dicapai.
2. Memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai–nilai yang mendasar dari pemilihan tujuan dan target.

Dari teori di atas secara spesifik bahwa evaluasi merupakan suatu aktivitas yang berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil suatu program atau kegiatan. Luankali (2007:94), menyatakan hasil atau manfaat dari evaluasi yang bersifat evaluatif seperti antara lain:

1. Fokus nilai
2. Interdependensi data
3. Orientasi masa kini dan masa lampau
4. Dualitas nilai (tujuan sekaligus cara)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa tujuan dan manfaat dari evaluasi secara umum digariskan sebagai tolak ukur dari suatu pencapaian hasil kerja (performance).

2.1.6 Evaluasi Program Desa

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukandengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasil lan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk :

a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

Menurut Suharsimi,Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009:7), terdapat perbedaan yang mencolok merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasil lnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksana ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria atau standar tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksana ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksana ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

2.1.7 Desa dan Administrasi Desa

Konsep Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011:4), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "Badan Hukum" dan ada pula "Badan Pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

2.1.8 Sistem

Dalam setiap organisasi atau perusahaan, ssitem sangat diperlukan untuk mengontrol seluruh kegiatan yang ada sehingga pekerjaan dapat terlaksanan dengan baik dan teratur. Terdapat beberapa pengertian sistem menurut para ahli. sistermterdiri atas objek-objek dan unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kestauan pemerosesan atau pengolahan yang tetentu, sistem dapat diartikan sebgai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terogranisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Menurut Kallaus dan Keeling (1998) dijelaskan bahwa, unsur-unsur sistem adalah:

1. *Input*, *input* adalah tahapan pertama dari sistem, seperti data, tenaga kerja dan energi lainnya, bahan-bahan, peralatan dan uang yang diterima dari bagian lainnya. Arus kerja yang terdapat didalam sistem dimulai dengan *input* biasanya berupa data, informasi dan bahan-bahan yang akan diolah dalam proses.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. *Processing,* Tahapan dalam sistem yang mengubah atau mengrasformasikan *input* ke dalam *form* atau dokumen yang diinginkan biasanya disebut dengan tahapan proses. Biasanya aktivitas dalam proses melibatkan orang dan mesin untuk menghasil lkan tahapan proses yang efektif.
3. Output, interaksi antara tahapan *input* dan proses menghasil lkan *output*, biasanya dalam formulir kertas dari dokumen yang disimpn secata elektronik. *Output* dapat disebut sebagai tujuan akhir dari sistem yang merupakan hasil dari *input* setelah dibuah dengan tahpan proses. *Output* juga biasanya digunakan oleh karyawana untuk mendapatkan pedoman tanggung jawabnnya. Misalnya saja *output* dari karyawan berupa laporan produktivitas kerja, hasil yang dicapai, keuntungan, hasil penjualan dan peningkatan efektivitas kerja.
4. *Feedback*, setelah melakukan tahapan diatas, data atau infomrasi sudah diproses ke dalam sistem. *Feedback* memungkinkan sistem untuk menentukan hasil yang diinginkan dalam pertemuan atau rapat. *Feedback* juga memungkinkan untuk mengevaluasi keefektivitasan karyawan. Sistem yang sangat kritisatau yang banyak melakukan *Feedback* bagi karyawannya membantu perusahaan atau organisasi untuk bertahan.
5. Pengawasan, *element* dalam yang sangat penting adalah pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan di dalam lingkungan perusahaan ataupun di luar lingkungan perusahaan. Didalam lingkungan perusahaan selalu ada prosedur dan peraturan yang harus ditaati oleh karyawan yang dapat dijadikan pedoman pengendalian dalam perusahaan. Lain halnya dengan lingkungan luar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perusahaan, biasanya meliputi adanya aturan dari pemerintah yang berisi tentang kode etik perusahaan yang berkaitan dengan moral perusahaan.

Dari unsur-unsur terbut diatas dapat dikatakan bahwa hubungan antara data, unsur atau objek yang satu salam lain bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut sistem.

2.1.9 Manajemen Pembangunan

Di negara sedang berkembang istilah pembangunan merupakan salah satu konsep yang paling mengemuka dan mendesak terkait dengan pengelolaan pembangunan bangsa. Bryant dan White (1989), melihat pembangunan sebagai sebuah konsep normatif dan merupakan eufemisme untuk perubahan, modernisasi, dan pertumbuhan. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi sebuah jargon dan kata kunci untuk segala aspek kehidupan.

Konsep manajemen pembangunan (management of development) merupakan sebuah perspektif dan istilah lain dari konsep administrasi pembangunan (administration of development), karena melihat peran administrasi dalam mewujudkan pembangunan (bryant dan white, 1989). Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi pembangunan adalah juga masalah manajemen pembangunan

Evaluasi atau penilaian merupakan salah satu fungsi manajemen pembangunan yang dipandang penting, karena menyangkut upaya untuk mengetahui apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Istilihaf evaluasi mempunyai arti yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berhubungan, masing-masing menunjuk pada penerapan beberapa nilai terhadap hasil pembangunan. Pada dasarnya istilah evaluasi dapat disamakan dengan penfsiran (appraisal), dan penilaian assesment, yang menjelaskan sebuah usaha untuk menganalisis hasil kegiatan pembangunan dalam arti satuan nilainya. Bryant dan white (1987) menyatakan bahwa secara sederhana evaluasi berkenan dengan kegiatan pengumpulan informasi tentang keadaan sebelumnya dan sesudah pelaksananaan pembangunan.

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasil lan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri yaitu program adalah rencana dan program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Menurut Endang Mulyatiningsih (2011:114-115), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
2. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

Menurut Suharsimi, Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009:7), terdapat perbedaan yang mencolok merupakan salah satu bentuk penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

evaluatif. Oleh karena itu, dalam antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasil lainnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksana ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria atau standar tertentu.
2. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksana ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksana ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

2.1.10 Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan dan melaksanakan Program Desa Maju Inhil Jaya yang secara umum berjalan baik. Panduan utama yang digunakan adalah Petunjuk Teknis Operasional. Untuk tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2017, dengan berbagai masukan dari lapangan, hasil konsolidasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Riau, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan berbagai pihak, maka pada tahun 2017 diterbitkan Petunjuk Teknis Operasional yang baru. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Operasional ini dapat menjawab kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah Program pembangunan Desa sesuai dengan Visi dan Misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2013 – 2018 hal ini tertuang dalam Perturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 sebagai wujud kebersamaan dalam rangka mengevaluasi dan memberi masukan atas pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) menuju Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025.

Tujuan khusus Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat;
5. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa melalui Badan Kerjasama Desa dan (BKD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
6. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup.

Keluaran Program meliputi:

1. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di Desa dan antar Desa;
2. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan;
3. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan pembangunan Program DMIJ bagi masyarakat;
4. Membangkitkan kembali rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat;
5. Menumbuhkembangkan rasa solidaritas semangat swadaya dan kreatifitas masyarakat dipedesaan;
6. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa dalam pengelolaan pembangunan;
7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perDesaan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian.

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Prinsip-prinsip itu meliputi:

a. Desentralisasi yaitu Memberikan ruang yang lebih luas kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

b. Keterpaduan yaitu Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

c. Efektif dan Efisien yaitu Proses (langkah dan cara kerja) yang tepat guna dan tepat sasaran dan membuahkan hasil l sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

d. Partisipasi yaitu Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Transparansi dan Akuntabel yaitu Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

f. Kesetaraan dan keadilan gender yaitu Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

g. Prioritas yaitu Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemenDesakan, kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan, upaya perbaikan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

h. Keberlanjutan yaitu Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem.

Kerangka Kerja Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yaitu:

1. Otonomi yaitu Hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pelaksanaan kegiatan menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi secara partisipatif dan demokratis, musyawarah dan mufakat.

3. Swakelola yaitu Prinsip Pengelolaan kegiatan pada Program DMIJ dilaksanakan secara swakelola. Proses dan mekanisme dilakukan sesuai dengan PTO dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sasaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yaitu Lokasi Sasaran: yaitu Lokasi sasaran Program DMIJ meliputi seluruh Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Kelompok Sasaran yaitu Masyarakat Desa Kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun 2017 Prioritas penggunaan Dana Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain:
   a. tambahan perahu;
   b. jalan pemukiman;
   c. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
   d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro
   e. lingkungan permukiman masyarakat Desa dan
   f. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. air bersih berskala Desa;

b. sanitasi lingkungan;

c. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa

3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a. taman bacaan masyarakat;

b. pendidikan anak usia dini;

c. balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat;

d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

a. pasar Desa;

b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

c. lumbung Desa;

d. pengelolaan usaha hutan Desa;

e. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa;

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a. Penghijauan;

b. Rehab Drainase

c. pembuatan teraseing

d. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel – variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan, yang berguna untuk membangun pikiran dalam konsep dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sugiyono (2010:60), Kerangka Berpikir merupakan model konseptuan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasil lan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri yaitu program adalah rencana dan program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Dilihat dari tujuannya yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

Pada Peneilitian ini Peneliti menggunakan teori Model *Before – After,* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah. Peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.I: Kerangka Berpikir Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi Di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil di Desa Sialang Panjang

↓

Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknik Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ)

↓

Standar	Aksi	
Kebijakan Pembangunan	**Input**	**Ouput**
Berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun 2017 Prioritas penggunaan Dana Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Pembangunan Desa antara lain: 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa	Berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun 2017 Prioritas penggunaan Dana Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Pembangunan Desa maka hasil dari kegiatan yang ada di Desa Sialang Panjang yaitu: 1. Adanya pembangunan infrastruktur lain yang di prioritaskan Desa dan keadaan Desa, hal ini dilihat dengan adanya Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Desa dimana pada tahun 2016 pembangunan jalan dan 2017 pembangunan jalan, rehab beton dan rehab jembatan serta pembangunan sarana pendukung pembinaan kemasyarakat termasuk bidang keamanan dan ketertiban Desa yaitu pembangunan plafon dan keramik kantor bhabin	Dengan adanya PTO ini peneliti ingin melihat dan mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksana ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya. Hasil yang ingin dilhat yaitu: **1.** Terjadinya peningkatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa. Seperti plafon dan keramik kantor babin, jalan, rehab beton dan jembatan
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	2. Tidak diangarkannya Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan pada musyawarah Desa	2. Seharunysa adanya peningkatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, seperti air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	3. Adanya penyediaan prasarana dan sarana pemerintah Desa dan pendidikan, hal ini dilihat dari adanya Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Prasarana Pendidikan pada tahun 2016, yaitu pembangunan gedung PAUD, Meubelier dan Toilet sedangkan tahun 2017 peningkatan mutu sarana pendidikan dan penimbunan halaman PAUD	3. Adanya peningkatan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti pembangunan PAUD, mutu sarana pendidikan dan penimbunan halaman PAUD, Meubelier dan Toilet.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	4. Tidak dianggarkannya Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada saat musyawarah Desa	4. Seharunysa adanya Peningkatan Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, seperti pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup	5. Adanya perbaikan lingkungan Desa dan pembangunan dan perbaikan drainase. Hal ini dilihat dari adanya Pelestarian Lingkungan Hidup pada tahun 2016 dengan kegiatan menahan penurunan tanah dan membangun tembok penahan tanah di halaman PUSTU Desa Sialang Panjang. Sedangkan tahun 2017 tidak dianggarakan pada saat musyawarah Desa	5. Terciptanya Pelestarian lingkungan hidup seperti penahanan tanah di PUSTU dan kegiatan lainnya seperti Penghijauan, Rehab Drainase, pembuatan teraseing dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

↓

Outcome

1. Kegiatan Pembangunan atau perbaikan prasarana jalan dan jembatan dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat di manfaatkan selama 2 sampai 5 tahun
2. Membangkitkan rasa kebersamaan dan semangat masyarakat dan bekembangnya rasa slodaritas semangat swadaya dan kreatifitas masyarakat
3. Pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin di dalam desa atau antar desa Berfungis dan bermanfaatnya hasil kegiatan pembangunan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) bagi masyarakat
4. Pembangunan partisipatif terhadap lingkungan

Sumber: Hasil Modifikasi Peneliti Tahun 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.3 Konsep Operasional

Operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan di tentukan kebenarannya kepada orang lain.

Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut:

1) Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih untuk meningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat Desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan
2) Adanya Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain: tambahan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat Desa dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
5) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
6) Pelestarian lingkungan hidup antara lain Penghijauan, Rehab Drainase, pembuatan teraseing dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

2.4 Operasional Variabel

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat operasionalisasi variabel yang akan menjelaskan terhadap ukuran penelitian yaitu konsep evaluasi, variabel serta indikator yang dinilai akan mengarahkan dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 2.2 Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu,Kabupaten Indragiri Hilir

No	Variabel	Indikator	Item-Item Penilaian	Penilaian
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasil lnya. salah satu model evaluasi adalah Model Before-After yaitu perbandingan antara sebelum dan sesusdah Ndraha (2003:202	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ)	Adanya Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa	1. Adanya kegiatan pembangunan infrastruktur Desa 2. Adanya kegiatan pemeliharaan infrastruktur Desa 3. Adanya kegiatan pemanfaatan infrastruktur Desa	Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif
		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Adanya kegiatan pembangunan, pemanfataan dan pemeliharaan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif
		Pelestarian lingkungan hidup	Adanya kegiatan pelestarian lingkungan	Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif
		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Adanya kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif
		Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	Adanya pengembangan usaha pertanian, ekonomi produktif dan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekomomi	Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif

Sumber: modifikasi Peneliti 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :